



Transfer Concept (Bahasa Version)

“Tubigon Mariculture Project”, Pangkalpinang City, Indonesia

The project is implemented by Pangkalpinang based on the best practice from Tubigon, Philippines. For further information as well as the English short version of this document, please visit: www.DELGOSEA.eu

You can also get in touch with the local contact for this project: Suryo Kusbandoro, suryokusbandoro@gmail.com

The content of this document is the responsibility of the respective author.
Version 2011.



This project is co-funded by the European Union.

A Project implemented by the consortium: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Thailand Environment Institute (TEI), Local Government Development Foundation Inc. (LOGODEF), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLG-ASPAC), Association of Indonesian Regency Governments (APKASI), Association of Cities of Vietnam (ACVN), and National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S).

DISAIN PROYEK PRAKTIK TERBAIK

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR SECARA TERPADU

Dengan Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Pangkal Pinang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Pangkal Pinang terletak di posisi 106°4'00"-106° 7'00" BT dan 2°4'00' - 2° 10'00" LS dengan luas daerah seluruhnya 118, 408 Km² (PP No 79 Tahun 2007) yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2011 (Mei) adalah 193.651 jiwa, yang tersebar di 7 kecamatan dan 42 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan dan Baturusa, Kecamatan Merawang, Kota Bangksa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru Kota Bangka Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat Kota Bangka.

Kota Pangkal Pinang adalah ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai:

- Pusat pemerintahan
- Pusat Industri, perdagangan dan jasa
- Pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Pusat perdagangan

Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang Tahun 2008-2013 adalah:

- Visi: Pusat Pelayanan jasa dan perdagangan di Bangka Belitung
- Misi:
 - Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
 - Mengurangi ketimpangan pendapatan dan secara berangsur
 - Menurunkan angka kemiskinan.
 - Memantapkan Ketahanan sosial dan kelembagaan serta transformasi perilaku kehidupan masyarakat.
 - Pendidikan bermutu dan terjangkau
 - Pelayanan kesehatan berkualitas

Propinsi Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan yang memiliki daerah pesisir yang cukup luas yang umumnya ditinggali masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial-ekonomi dan latar pendidikan yang relatif rendah. Kondisi sosial masyarakat pesisir seperti ini membuat mereka sulit mengikuti perkembangan di daerahnya yang umumnya menggunakan teknologi tinggi, sehingga mereka cenderung sering menjadi objek (beban) daripada subjek pembangunan di daerah pesisir. Selain itu, mungkin karena faktor ketidaktahuan atau karena tekanan ekonomi, maka aktivitas mereka sering menyebabkan tekanan terhadap ekosistem di daerah pesisir yang berlanjut dengan kerusakan ekosistem tersebut.

Kondisi kini yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pangkal Pinang adalah terjadinya benturan kepentingan antara nelayan, pelaku usaha tambang, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Di mana benturan tersebut yaitu terjadinya perebutan dalam pemanfaatan hasil sumber daya perikanan dan kelautan, serta pemanfaatan tataruang laut dan pesisir. Aktifitas pertambangan yang terjadi menyebabkan berubahnya fungsi ekologis dan lingkungan pesisir dan ekosistem laut yang menyebabkan menurunnya hasil tangkapan dan berkurangnya area tangkapan, sehingga membawa dampak terhadap penurunan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir.

Hal ini terjadi disebabkan belum adanya pengaturan tata ruang laut dan pesisir. Khususnya zona pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir.

2. Maksud dan Tujuan

Melihat kondisi yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pangkal Pinang pada umumnya hampir sama pada kota Tubigon, Filipina. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkeinginan mereplikasi (Best Practices Marine Culture) yang telah dilaksanakan Kota Tubigon. Namun dalam mereplikasi Best Practices Marine Culture tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, tapi disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta keinginan masyarakat, Pemerintah dan *stakeholder* (pengusaha).

Tujuan Kegiatan Best Practice Marine Culture di Kota Pangkal Pinang untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha bidang kelautan perikanan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat pesisir wilayah *best practice*.
- Meningkatkan Kualitas SDM: aparatur, nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha bidang kelautan perikanan.

- Menyediakan bahan pangan asal ikan dalam upaya mendukung kecerdasan dan kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendorong usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan serta mewujudkan kawasan industri perikanan di muara sungai Baturusa.
- Mengembangkan dan mengelola secara optimal sumber daya kelautan, perikanan dan wilayah pesisir.
- Menjaga kestabilan dan kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Best Practice Marine Culture Kota Pangkal Pinang berlokasi di kawasan Tanjung Bunga dan kawasan laut teritoria hingga 4 (empat) mil laut di kelurahan Air Itam, Tembran dan Sinar Bulan kec. Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. GAMBARAN UMUM

1. Keadaan Wilayah

Kawasan Tanjung Bunga merupakan bagian dari Kelurahan Air Itam, Tembran Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan terletak di bagian Timur Kota Pangkal Pinang yang berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan, bersebelahan dengan kawasan wisata Pantai Pasir Padi yang mempunyai garis pantai 8,2 Km, terdapat tiga pelabuhan nelayan, 6 ha tambak/kolam ikan yang belum dikelola secara maksimal. Hamparan mangrove ekosistem 27 ha.

Batas wilayah:

- Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Barat dengan kelurahan Bacang dan Air Mawar
- Sebelah Utara dengan Sungai BATU Rusa
- Sebelah Selatan dengan Desa Padang BARU, Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru

1.1 Kependudukan

Wilayah Air Itam (kelurahan Air Itam, Tembran, Sinar Bulan) mempunyai penduduk 9.046 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk berdasar pendidikan

Tingkat sekolah	Jumlah (orang)	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
-----------------	----------------	------------------	------------------

		(orang)	(orang)
TK	198	117	81
SD	2.748	1.528	1.220
SLTP	2.303	1.248	1.055
SLTA	1.975	1.048	929
Akademis/P T	467	259	208
Kursus	54	35	19
Jumlah	7.755	4.243	3.512

Tabel Jumlah penduduk menurut pekerjaan

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Jumlah Laki-laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
Petani	1.209	1.001	282
Nelayan	167	150	17
Pedagang	692	343	349
Pegawai negeri	462	243	159
ABRI	58	50	8
Swasta	1.270	1.075	195
Buruh	1.377	443	234
Jumlah	5.216	3.979	1.237

Tabel Jumlah penduduk menurut agama

Agama	Jumlah (orang)	Jumlah Laki-laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
Islam	7.215	3.714	3.501
Katolik	271	150	121
Protestan	197	44	153
Hindu	15	9	6
Budha	223	170	53
Kong Hu Cu	339	177	162
Jumlah	8.260	4.261	3.989

Tabel Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan	Jumlah (orang)	Jumlah Laki-laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
Pribumi	8.427	4.343	4.080
Keturunan	619	317	302
Jumlah	9.046	4.660	4.396

1.2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

Air Itam merupakan Kawasan strategis sebagai pusat perkantoran Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perkantoran Instansi vertikal (kementerian). Pusat Kecamatan Bukit Intan, Kawasan pengembangan Pariwisata, Perikanan dan fasilitas-fasilitas lainnya:

Tabel Jumlah Fasilitas di Kepulauan Bangka Belitung

Pendidikan		Kesehatan		Peribadatan		Pariwisata	
K	Kw	K	Kw	K	Kw	K	Kw
TK	2	Puskesmas	1	Masjid	5	Pantai	2
SD	2	Bidan	3	Surau	10	Hotel/ penginapan	2
SMP	1	Dokter	4	Gereja	1	Restoran	4
SLTA	1	Apotik/ Toko Obat	1	Vihara	-	Rumah makan	8
Perguruan Tinggi	1			Kelenteng	2	Warung	28
Pesantren	1			Pure	1	Outbound	1
PAUD	4						
TPA	7						

Keterangan :

K = Komponen

Kw = Kwantity

Jalan

Jalan sebagian besar sudah baik dan diaspal, hanya sebagian kecil saja yang rusak dan dalam proses diaspal, terutama pada kawasan Best Practices.

2. Sumberdaya perikanan

2.1 Kelembagaan Masyarakat Pesisir

No.	Nama Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota (orang)
1	Kelompok Nelayan	8	167
2	Kelompok Pembudidaya	-	8
3	Kelompok Perempuan Pesisir	-	30
4	Kelompok Pengolahan	-	20
5	Kelompok Pemasaran	-	21
6	POKWASMAS	1	21

2.2 Sarana Prasarana Perikanan

No.	Uraian	Jumlah (unit)
1.	Kelembagaan Ekonomi:Kop./KUD	-
2.	Pelabuhan/Dermaga: -PPI/TPI -Pelabuhan Nelayan (Jetty):	1 3
3.	SPBN	1
4.	Laboratorium: (LPMHP)	1
5.	Pos keamanan Laut	1
6.	Pos Pengawasan Perikanan	1
7.	Perusahaan Perikanan	6
8.	Armada Tangkap (Kapal/Perahu)	144
9.	Kedai Pesisir	1
10.	Kios penjualan Ikan	21

Sumber Daya Perikanan di Wilayah Best Practice cukup baik untuk pengembangan usaha perikanan mulai dari penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Walaupun kita hanya mempunyai kewenangan dalam pengolahan sebatas 4 (empat) mil laut dan daratan tidak seluas daerah lain di Pulau Bangka. Apabila dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal akan meningkatkan pendapatan nelayan, khususnya masyarakat pesisir di wilayah Best Practice.

Namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir di Kota Pangkal Pinang khususnya pada kawasan Best Practice masih banyak tumpang tindih kepentingan dan belum adanya keterpaduan. Sehingga yang menjadi korbannya adalah masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil yang notabene miskin dan berpendidikan rendah, sehingga tidak mampu keluar dari keterpurukan yang menimpa diri dan keluarganya.

C. PERMASALAHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi sektor Kelautan dan Perikanan yang selama ini

No.	Uraian/Matrik	Kegiatan Utama	Kegiatan Pendukung
-----	---------------	----------------	--------------------

terjadi:

- Sumber Daya manusia rendah
- Pendapatan nelayan/masyarakat pesisir rendah
- Terjadinya konflik kepentingan penggunaan sumber daya laut dan pesisir
- Kurangnya modal/dana
- Masih adanya sistem ijon pada jaringan pemasaran hasil perikanan di masyarakat pesisir
- Adanya IUU (*illegal, unreported, unregulated*) fishing
- Penambangan timah lepas pantai
- Pembalakan hutan mangrove
- Belum adanya zonasi kawasan laut dan pesisir
- Belum terpadunya pengelolaan dan pemanfaatan potensi laut dan pesisir
- Kurangnya Sarana dan Prasarana nelayan dan masyarakat pesisir
- Terjadinya sedimentasi

2. Dampak Kerusakan Laut dan Pesisir

- Pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir lamban
- Terjadinya kerusakan dan perubahan fisik laut dan pesisir
- Kelangkaan potensi biota laut
- Tidak terkontrolnya pengelolaan potensi laut dan pesisir
- Mata pencarian masyarakat pesisir yang monoton
- Alih profesi dari nelayan menjadi buruh tambang

3. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan dampak yang timbul tersebut pada poin 1 dan 2 perlu adanya upaya-upaya pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam rangka pemanfaatan dan pengolahan sumber daya laut dan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan di wilayah *best practices* dan terjaganya ekosistem pesisir dan laut.

Upaya-upaya tersebut bisa dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan bisa berupa kebijakan-kebijakan program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat pesisir untuk menjamin dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya nelayan pesisir.

3.1 Kebijakan Program

1.	Peningkatan Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Juknis • Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan • Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penggunaan GPS - Pelatihan Teknik Penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal - Sosialisasi peraturan dan UU Perikanan - Pelatihan penerapan sistem rantai dingin - Pelatihan pengolahan hasil perikanan - Pelatihan agribisnis perikanan - Pelatihan teknis budidaya dan pasca panen - Pelatihan pembuatan pakan ikan - Pelatihan pemberdayaan perempuan pesisir - Studi banding
2.	Peningkatan Sistem Permodalan dan Pengembangan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Jukni • Rapat Koordinasi antar pemangku kepentingan • Pembinaan dan pendampingan teknis perikanan dan manajemen usaha • Pendataan RTP dan penerbitan Kartu Nelayan • Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan Hasil Usaha - Pengadaan Armada Wisata Bahari - Pengadaan Kios/warung boga menu ikan - Pengadaan warung/ kedai pesisir - Pengadaan peralatan wisata bahari (selama dasar dan alat scuba) - Penerapan kegiatan agribisnis perikanan
3.	Peningkatan Sistem Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Juknis • Pengadaan sarana prasarana ECS • (Coolbox, showcase, coolbox khusus sepeda motor). • Penerapan sistem perguliran dalam kelompok penerima sarana ECS • Monitoring dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan kegiatan agribisnis perikanan

		Evaluasi	
4.	Pengembangan Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kolam terpal budi daya ikan lele • Identifikasi dan penunjukan kelompok pengelola budidaya • Monitoring dan evaluasi • Pelaksanaan kajian teknis • Rehabilitasi tambak, sarana dan prasarana • Pengadaan saprokan 	
5.	Pengembangan Saprasi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Juknis • Bantuan pemeliharaan perahu motor temple • Identifikasi nelayan penerima bantuan perguliran • Penerapan sistem perguliran dalam kelompok • Pengadaan 20 unit mesin temple 5 PK dan trammel Net 200 pease • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Aktrakton cumi dan rumpon - Pengadaan 1 unit Jetty, Talud, Gasebo, shalter, pemecah gelombang, MCK, sarana air bersih dan penerangan (genset, solar cel, PLN) - Peningkatan jalan akses menuju Tanjung Bunga 5.000 m x 6 m
6.	Pengawas Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan pendampingan kelompok • Penilaian kelompok • Marjer kelompok • Pembentukan koperasi perikanan • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan koperasi berbadan hukum

7.	Kelestarian ekosistem laut dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi mangrove • Pengawasan sumber daya laut dan pesisir • Penyusunan Raperda RT/RW (Zonasi) laut dan pesisir • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian hukum dan akademik dampak lingkungan akibat penambangan timah terhadap kelestarian SDI dan SDA di wilayah laut dan pesisir Kota Pangkal Pinang - Rehabilitasi Terumbu Karang
----	--	---	--

D. METODOLOGI

Metode partisipatif adalah metode yang digunakan dalam program ini untuk mencapai tujuan program. 3 Kelompok yang akan terlibat dalam program ini adalah 1; masyarakat sipil (2) sekolah (3) dunia usaha (4) pemerintah Kota Pangkal Pinang.

E. MANFAAT PROGRAM

Penerima manfaat program penjernihan air laut ini adalah masyarakat Kota Pangkal Pinang.

F. WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM

Program ini berlangsung sejak semester II tahun 2011 hingga 2012.

G. PELAKSANA PROGRAM

Satuan pelaksana program ini adalah dibawah koordinasi POKJA Kota Pangkal Pinang dengan leading sector Dinas Pendidikan, BPLH dan DKPP Kota Pangkal Pinang.

H. PENDANAAN

Jumlah seluruh biaya yang diperlukan untuk program ini adalah **Rp. 35.616.020.000.**

Jumlah dana tersebut akan dianggarkan dari APBD Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 dan APBD perubahan tahun 2011. Strategi pendanaan dari sumber lain dimungkinkan dengan melakukan kemitraan bersama pihak-pihak lain yang memiliki visi yang sama untuk program

I. MANAJEMEN RESIKO

Dalam perjalanan program, tidak menutup kemungkinan akan muncul resiko yang harus diantisipasi pelaksana program. Diantaranya adalah:

1. Anggaran dari APBD yang belum atau terlambat turun, baik saat akan pelaksanaan program ataupun di tengah perjalanan pelaksanaan program.
2. Pelaksana program (Pokja) yang tiba-tiba dipindah ke bagian lain di dinas/struktur pemerintahan kota yang menyebabkan peran-perannya menjadi tidak maksimal.

3. Penyimpangan substansi dalam pelaksanaan program dari apa yang telah direncanakan dalam konsep.

J. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pemantauan

Kegiatan pemantauan dilaksanakan selama kegiatan Best Practice berjalan oleh dinas/instansi terkait (Tim Pokja), sejak tingkat Kota Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tingkat nasional dan DELGOSEA (UCLG) serta APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jalannya kegiatan, mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apakah sesuai dengan rencana atau tidak dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan program.

2. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama-sama tim, kelompok kerja, fasilitator nasional, DELGOSEA dan APEKSI yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran hingga berakhirnya pelaksanaan

K. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

Program ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pendidikan lingkungan, kejernihan air laut dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkal Pinang.

Adapun keberlanjutan program ini tergantung pada kepemimpinan di kota setempat dan bagaimana implementasi di lapangan. Dengan pendekatan yang tepat, baik saat sosialisasi ataupun implementasi, koordinasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat, termasuk bagaimana masyarakat merasa memiliki (*ownership*) program ini, maka keberlanjutan program merupakan suatu keniscayaan walaupun program telah usai.

L. MATRIK DOKUMEN DESAIN PROYEK BEST PRACTICE MARINE CULTURE KOTA PANGKAL PINANG

Terlampir